

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara

Henri Prianto Sinurat ^a Ervina Yunita ^b Rati Sumanti ^c

^{a b c} Puslatbang KHAN

e-mail : ^a henrisinurat@yahoo.co.uk, ^b vina.mat04@gmail.com, ^c ratisumanti@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah secara tegas menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di berbagai lokasi, termasuk di tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan lokasi lain yang telah ditentukan. Salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam pelayanan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok di lembaga ini. Dalam melihat implementasinya, penelitian ini menerapkan teori implementasi Ripley dan Franklin. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Hukum Administrasi Negara dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, serta pelaksanaan dan dampak dari kebijakan ini. Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Hukum Administrasi Negara telah berhasil menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan baik. Kunci utama dalam menjaga keberhasilan implementasi ini adalah komitmen bersama, baik dari pihak internal lembaga maupun pihak-pihak terkait. Upaya bersama ini penting untuk memastikan bahwa Kawasan Tanpa Rokok terus terjaga dan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang berkunjung ke lembaga ini.

Kata Kunci: kawasan tanpa rokok; implementasi kebijakan; lembaga pelatihan

Implementation of Non-Smoking Areas at Center of Training and Development and Research of Public Administration Laws

Abstract

The government has established No Smoking Areas in healthcare facilities, educational institutions, playgrounds, places of worship, public transportation, workplaces, public spaces, and other designated areas. Center of Training and Development and Research of Public Administration Laws are government agencies tasked with providing training and competency development for public servants. This research aims to examine the implementation of No Smoking Areas at Center of Training and Development and Research of Public Administration Laws. To assess its implementation, Ripley and Franklin's implementation theory is employed. This research uses a qualitative method with data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. The implementation of No Smoking Areas is influenced by compliance, the smoothness of routines, and enforcement and its impact. Center of Training and Development and Research of Public

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Administration Laws have effectively implemented No Smoking Areas. It requires a collective commitment from internal stakeholders and external parties to ensure the sustainability of No Smoking Areas.

Keywords; No Smoking Areas; Policy Implementation; Training Center

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Melalui kebijakan tersebut pada Pasal 115 menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) wajib tersedia di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Provinsi Aceh menurunkan kebijakan tersebut melalui *Qanun* (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Meski peraturan ini telah ditetapkan, tetapi belum semua instansi terkait menerapkan KTR di lingkungannya.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) merupakan salah satu institusi pemerintah yang menjalankan pelayanan dalam pelatihan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengacu pada ketentuan UU 36 Tahun 2009, Puslatbang KHAN menerapkan lingkungan Puslatbang KHAN sebagai daerah yang bebas dari asap rokok. Hal ini sebagai upaya mendorong tempat proses belajar mengajar untuk ASN yang terbebas dari asap rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok tidak hanya di ruang kelas pembelajaran saja, tetapi juga diterapkan di ruang perkantoran, halaman perkantoran, asrama, masjid, hingga ruang makan. Meski demikian, Puslatbang KHAN memberikan ruang di beberapa titik sebagai kawasan merokok yang persentase wilayahnya kurang dari 5% dari seluruh bangunan.

I Gede Yudha Eka dalam penelitian terdahulunya (Pramana Putra & Setyowati, 2022), menemukan bahwa belum optimalnya implementasi KTR di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta karena (1) komunikasi yang belum optimal; (2) disiplin para kelompok sasaran yang masih rendah; (3) intensitas pengawasan yang masih rendah; dan (4) fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim.

Melalui penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Galuh Permatasari (Galuh Permatasari & Nur Arifatus Sholihah, 2022) mengungkapkan bahwa implementasi KTR belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pengunjung yang kurang paham terhadap kebijakan KTR di STIKES Griya Husada Sumbawa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Indra (Prayoga, 2022) mengungkapkan bahwa dalam implementasi KTR di Komplek Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung masih terdapat kelemahan, yaitu belum diterapkannya tindakan tegas dan pemberian sanksi bagi pelanggar kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, fokus dari penelitian ini adalah mengamati dan melihat implementasi KTR di lingkungan pendidikan pelatihan dan lingkungan pemerintahan melalui Puslatbang KHAN. Kebaruan kajian ini adalah membahas faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program KTR melalui teori Ripley dan Franklin. Teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang; 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah (Ripley & Grace A. Franklin, 1986).

B. PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Pada Ketentuan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada kepatuhan pelaksana dalam menjalankan ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun turunannya. Puslatbang KHAN telah menetapkan bahwa lingkungannya merupakan bagian dari Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai institusi pendidikan dan pelatihan aparatur, Puslatbang

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

KHAN juga mempunyai tempat khusus merokok. Hal ini tentunya juga menjaga hak asasi manusia yang hendak merokok juga tetap terpenuhi. Terdapat 3 (tiga) lokasi tempat khusus merokok, yaitu lobi luar restaurant, halaman belakang asrama, dan kantin. Setiap lokasi tersebut mengacu pada Qanun 20 Tahun 2020. Tempat khusus merokok merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar. Sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Tempat khusus merokok juga terpisah dari bangunan lain yang digunakan untuk beraktivitas, jauh dari tempat orang dan kendaraan yang berlalulalang, dan jauh dari area parker kendaraan. Selain hal tersebut, Puslatbang KHAN juga menyediakan kelengkapan asbak atau tempat pembuangan abu dan informasi bahaya merokok serta informasi simbol tempat merokok.

2. Kelancaran Rutinitas

Keberhasilan implementasi KTR di lingkungan Puslatbang KHAN karena dikelola dengan baik. Adapun kelancaran implementasi KTR dipengaruhi oleh sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi. Pada pelaksanaannya, Puslatbang KHAN selalu menyampaikan sosialisasi kepada tamu atau *stakeholder* yang berkunjung terkait penerapan KTR. Sosialisasi juga disampaikan pada setiap kegiatan seminar, pelatihan aparatur, dan *workshop*.

Pengawasan pengawasan KTR dilaksanakan pada dua hal, yaitu orang yang merokok dan ketersediaan tempat khusus merokok. Setiap pegawai dan Tenaga Kontrak Perorangan (TKP) Puslatbang KHAN menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pengawasan orang yang merokok. Mereka akan menyampaikan himbauan kepada orang yang merokok pada KTR Puslatbang KHAN. Mereka juga akan menjadi percontohan dengan merokok pada tempatnya. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tujuan evaluasi adalah untuk memantau efektifitas dan keberhasilan penerapan KTR. Evaluasi yang dilaksanakan Puslatbang KHAN dalam rangka mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hal tersebut meliputi tantangan sosial dan budaya, ketersediaan infrastruktur, serta sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar.

3. Pelaksanaan dan Dampak

Implementasi KTR di Puslatbang KHAN mempunyai proses yang panjang. Kebijakan KTR pertama kali diterapkan pada tahun 2014. Kebijakan KTR tersebut melarang merokok di dalam ruangan kerja, ruangan kelas, ruangan makan, ruangan asrama, dan ruangan lainnya. Penerapan kebijakan ini awalnya adalah menyisir ruangan yang sering digunakan.

Tahapan selanjutnya adalah perluasan KTR yang menasar hingga ke halaman parkir Puslatbang KHAN. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang terbebas dari asap rokok. Pada saat perluasan KTR tersebut, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, Tenaga Kontrak Perorangan dan *Stakeholder* yang berkunjung. Alasan yang dilontarkan adalah karena tempat khusus merokok berada di lokasi yang jauh.

Pada awal diberlakukannya KTR, peserta pelatihan di Puslatbang KHAN juga kerap melakukan pelanggaran. Mereka secara sembunyi-sembunyi merokok di tempat yang dilarang. Para pelanggar mendapatkan teguran dari penyelenggara pelatihan. Bahkan salah seorang pelanggar dikenai sanksi untuk mengganti laci asrama yang dijadikan sebagai asbak rokok.

Untuk meningkatkan pengawasan, ditambahkan *Closed Circuit Television* (CCTV) di lingkungan Puslatbang KHAN. Keberadaan CCTV ini menambah jumlah pelanggaran. Pengurangan pelanggaran berhasil dicapai karena adanya peningkatan pemahaman dan penyampaian peringatan. Penegakan kebijakan yang tegas telah berkontribusi pada peningkatan kepedulian terhadap KTR.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pemantauan secara langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puslatbang KHAN telah berjalan dengan baik. Komitmen dari pegawai dan Tenaga Kontrak Perorangan di Puslatbang KHAN menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi KTR. Puslatbang KHAN selalu konsisten dalam melaksanakan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan KTR. Pada

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

pelaksanaannya, Puslatbang KHAN menerapkan aturan yang sama terhadap setiap pelanggar. Sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di KTR Puslatbang KHAN.

Untuk menjaga kesinambungan KTR, maka Puslatbang KHAN harus menjaga komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pemantauan dan sosialisasi. Puslatbang KHAN juga dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak rokok untuk meningkatkan kesadaran individu dalam mendukung KTR.

REFERENSI

- Amanah, S., Mochtar, S., & Jubaedah, E. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i1.16>
- Iman, S., Jubaedah, E., & Sobandi, B. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Bangunan Gedung Hijau di Kota Bandung. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 2(1), 61-70. <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i1.11>
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103. <http://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.019>
- Pramana Putra, I. G. Y. E., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1). <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.223>
- Prayoga, I. A. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09). <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i9.690>
- Permatasari, G., Sholihah, N.A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/jrik.v2i2.359>
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>
- Ripley, R. B., & Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (second edition). The Dorsey Press.
- Siskawati, C., Mochtar, S., & Jubaedah, E. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(1), 62-72. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i1.34>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra, F. A. (2022). Sumedang Regency ASN Digital Literacy (ASN Digital Literacy Improvement Strategy Sumedang Regency). *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 192-202. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v6i2.638>
- Yuafi, H., Mulyadi, D., & Listiani, T. (2021). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 2(1), 10-18. <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i1.6>